

SIARAN PERS



Nomor: 28/HMS/SP/VII/2026

Tanggal: 6 Juli 2026

Bawaslu Jakarta Barat Tingkatkan Kapasitas SDM Melalui Kajian Wawasan Legal Hukum (KAWAL)

Jakarta Barat - Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan kegiatan Kajian Wawasan Legal Hukum (KAWAL) sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan pemilihan. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Sekretariat, para Kepala Subbagian, staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, serta mahasiswa magang dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Priambodo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini sebagian pegawai tengah mengikuti pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan beberapa pegawai lainnya sedang menjalani cuti. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan harus tetap berjalan optimal melalui koordinasi dan kolaborasi seluruh jajaran.

"Situasi ini menjadi momentum untuk terus memperkuat kerja sama dan saling mendukung agar seluruh tugas kelembagaan tetap terlaksana secara maksimal," ujar Priambodo.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Anta Ovia Bancin, menjelaskan bahwa Kajian Wawasan Legal Hukum merupakan agenda yang telah direncanakan sejak April 2026. Meskipun sempat dijadwalkan berlangsung pada Juni, kegiatan tersebut baru dapat terlaksana pada hari ini.

Menurutnya, KAWAL menjadi wadah pembelajaran bersama bagi seluruh jajaran Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat guna memperkuat pemahaman terhadap aspek hukum, khususnya di bidang pemilihan.

SIARAN PERS



"Pemahaman hukum tidak hanya diperlukan oleh pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, tetapi juga menjadi bekal penting bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap peserta mampu memahami sekaligus mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari," ungkap Anta.

Pada kesempatan tersebut, materi disampaikan oleh Sakhroji, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Pendidikan dan Pelatihan. Dalam pemaparannya, Sakhroji mengulas mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu melalui studi kasus dugaan penggelembungan maupun pergeseran suara dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Materi yang disampaikan meliputi tahapan penanganan laporan dugaan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan syarat formil dan materiil, pelaksanaan kajian awal, hingga koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penyelenggaraan rekapitulasi suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip transparansi dalam proses penghitungan suara, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

Melalui penyelenggaraan Kajian Wawasan Legal Hukum (KAWAL), Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman regulasi kepemiluan, meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran, serta mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang profesional, efektif, dan berintegritas demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 64A,

Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat 11530

